

MODEL DESA BERKETAHANAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ahmad Suhendi

ABSTRACT

Social problems in Indonesia are varies and complex. The Ministry of Social affairs have conducted varies programs. One among those programs is social empowerment that conducted by The Agency for Education and Social Welfare Research. The program so called by Model Desa/Kelurahan Berketahanan Sosial (Village with Social Resilience Model). It means the village has already penetrated four dimensions of social resilience, so called as Village with Social Resilience.

The model has appreciated by Local Government. The project has been done in social empowerment principle, since need assessment, action plan, actualizing of model, monitoring and evaluation.

Keywords: Model, Village with social resilience, Social Welfare Development

ABSTRAK

Permasalahan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih relatif banyak jumlahnya dan kompleks permasalahannya. Selama ini Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berbuat banyak, melalui Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial telah melakukan pemberdayaan sosial di beberapa provinsi. Kegiatan yang dilakukan yaitu Model Desa/ Kelurahan Berketahanan Sosial. Artinya terdapat satu desa atau kelurahan yang telah menerapkan empat dimensi ketahanan sosial masyarakat, sehingga disebut sebagai Desa/ Kelurahan Berketahanan Sosial. Desa/ Kelurahan Berketahanan Sosial ada yang telah memberi manfaat secara langsung sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa/kelurahan setempat.

Kegiatan tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah kabupaten, karena dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan sosial yang dilakukan secara bertahap seperti identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi.

Kata kunci: Model, Desa Berketahanan Sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang diibaratkan sebagai zamrud khatulistiwa di nusantara karena keberadaan pulau-pulaunya yang terbentang luas dari Sabang di bagian barat sampai Merauke di bagian timur, dan dari Pulau Miangas di bagian utara sampai Pulau Rote di bagian selatan. Menurut pakar di bidang lingkungan hidup, Emil Salim (2007) mengatakan bahwa, “saat ini Indonesia memiliki 17.560 pulau, sebagian dari pulau itu tidak berpenghuni”. Belasan ribu pulau tersebut mempunyai ukuran dan bentuknya masing-masing, mulai dari yang berskala kecil sampai dengan yang berskala besar.

Kondisi geografis yang demikian itulah, maka penduduk NKRI-pun tersebar hampir ke seluruh kepulauan nusantara yang ada. Oleh karena itu pula penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang mempunyai beraneka ragam macam bahasa dan kebudayaannya. Di satu sisi keberagaman etnis, bahasa, dan kebudayaan daerah tersebut merupakan sebuah kekayaan khasanah bangsa yang tidak terhingga nilainya, dan di sisi lainnya merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, melindungi, mengembangkan, dan melestarikannya. Tidak jarang dengan kondisi keberagaman etnis, bahasa, dan kebudayaan daerah tersebut dapat menjadi masalah tersendiri, sehingga memunculkan kerikil atau gesekan-gesekan di antara individunya. Bahkan jika tidak dapat disikapi secara arif dan bijaksana, maka timbul kerikil atau gesekan yang besar sehingga memunculkan konflik atau kekerasan di antara individu ataupun kelompok bahkan sampai kepada komunitas.

Konflik atau kekerasan yang berkaitan dengan hal tersebut pernah terjadi dan mungkin sewaktu-waktu bisa terjadi lagi jika komponen masyarakat tidak dapat meredam dan menyikapi dengan sebaik-baiknya, seperti kejadian di Poso (Sulawesi), Sambas (Kalimantan), Ambon (Maluku), Jakarta (DKI Jakarta) dan di belahan NKRI lainnya. Apalagi sejak krisis moneter melanda Bangsa Indonesia pada medio tahun 1997 dan era reformasi bergulir yang kemudian menjadi titik masuk (*entry point*) dibukanya “kran” berpolitik di era otonomi daerah. Dengan demikian, maka alangkah derasnya bermunculan partai-partai baru untuk menyemarakkan peta kehidupan berdemokrasi bangsa. Pemilihan pimpinan secara langsung telah diberlakukan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, sampai dengan Kepala Desa. Pemilihan tersebut dilakukan secara demokrasi dengan berazaskan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER). Namun di tengah jalan atau di akhir jalan tidak jarang pula timbul gesekan di antara para pendukung masing-masing calon yang dijagokannya, bahkan sampai kepada terjadi konflik yang berkepanjangan apabila “jagonya” tidak dapat mengungguli lawan-lawannya. Selain daripada konflik ataupun kerusakan yang pernah melanda Bangsa Indonesia, dalam lingkungan hiduppun Bangsa Indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena adanya penebangan atau pembalakan hutan secara ilegal (*illegal logging*). Walaupun pemerintah bekerjasama dengan masyarakat telah berusaha untuk menanggulangi masalah tersebut, namun hasilnya belum dirasakan secara maksimal.

Di sisi lain sebagaimana diketahui terdapat juga Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) di negara tercinta ini yang masih relatif banyak jumlahnya dan kompleks permasalahannya. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin, 2008) Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengklasifikasikan mengenai PMKS menjadi 22 (dua puluh dua) jenis, antara lain Keluarga Fakir Miskin, Anak Terlantar, Penyandang Cacat, Komunitas Adat Terpencil, Lanjut Usia Terlantar, dan yang lainnya. Selama ini Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berbuat banyak dan maksimal dalam penanganan dan pelayanan terhadap PMKS tersebut. Penanganan dan pelayanan terhadap PMKS telah, sedang, dan akan terus dilaksanakan, baik secara sektoral maupun melalui kerjasama berbagai pihak antara lain dengan instansi terkait (baik pusat maupun daerah), Dunia Usaha, Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan kalangan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial yang ada. Hal itu dilakukan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Demikian halnya dalam pelaksanaan penanganan dan pelayanan terhadap PMKS telah dilakukan dengan berbagai cara atau metode dan berbagai model, dengan tujuan agar secara kuantitas dan kualitas PMKS dapat diatasi dan dikurangi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai "Model Desa Berketahanan Pangan" dalam menanggulangi masalah perpangan; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempunyai "Desa Siaga" dalam menanggulangi masalah kesehatan; dan Bank Indonesia mempunyai "Model Desa Kita" dalam merevitalisasi potensi desa agar berkembang (Rakyat Merdeka, 2008 : h. 20).

Kementerian Sosial Republik Indonesia pun melalui Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial mempunyai suatu model yang dinamakan "**Model Desa Berketahanan Sosial**". Model ini yang telah dilakukan di puluhan desa maupun kelurahan di beberapa provinsi sebagai bagian dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

II. PENGERTIAN

Beberapa pengertian yang terkait dengan model desa berketahanan sosial. Pengertian-pengertian tersebut antara lain :

1. Model Desa Berketahanan Sosial, adalah sebuah model yang terdapat rangkaian prosedur atau langkah-langkah baku untuk melakukan suatu kegiatan pemberdayaan terhadap pranata sosial. *Output* yang dihasilkan dalam model ini adalah dapat meningkatkan atau mengembangkan sistem ketahanan sosial masyarakat yang bertitik tolak pada kemampuan pranata sosial dalam mengelola modal sosial (*social capital*), mampu menggerakkan dan memobilisasi anggota komunitas lokal dalam memberikan serta meningkatkan; 1) Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 2) Kesempatan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi sosial lokal; 3) Pengendalian terhadap konflik sosial atau tindak kekerasan; dan 4) Pemeliharaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial (Suhendi, dkk. 2007:h.25).
2. Pranata Sosial, adalah suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pranata

sosial meliputi lembaga atau institusi yang bersifat formal dan informal, nilai dan norma sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku serta jaringan sosial di antara anggotanya (Kepmensos RI Nomor 12/HUK/2006 : h. 3).

3. Pemberdayaan, sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka (Ife, 1995). Sedangkan Hikmat (2001) mengatakan, bahwa dalam konsep pemberdayaan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang signifikan dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran LSM, Organisasi lokal, dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen perubahan dan pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam kondisi yang demikian, permasalahan sosial dapat ditangani oleh masyarakat atas fasilitas dari pemerintah.
4. Focused Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah/Terpadu, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam proses penelitian. *FGD* berarti suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Santoso, dkk. 2003: h. 7). Hal senada juga dinyatakan Irwanto (2006 : h. 1-2), bahwa *FGD*

adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sebagaimana makna dari *FGD*, maka di dalamnya terdapat tiga kata kunci, yaitu; 1) Diskusi=bukan wawancara atau obrolan; 2) Kelompok=bukan individual; dan 3) Terfokus=bukan bebas.

Keempat pengertian yang dikemukakan di atas merupakan satu paket di dalam pelaksanaan kegiatan Model Desa Berketahanan Sosial. Namun demikian agar dalam pelaksanaannya lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dilengkapi dengan metode *Participation Rural Apraisal (PRA)*, Praktek melalui Simulasi, dan diselingi dengan *ice breacking* melalui *Games* atau *Role Playing*.

III. MODEL DESA BERKETAHANAN SOSIAL

1. Nama Model

Model Desa Berketahanan Sosial merupakan salah satu produk dari banyak model yang telah dihasilkan dan diluncurkan oleh Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kerangka pikir Model Desa Berketahanan Sosial mengacu pada Kepmensos RI No. 12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial. Model tersebut telah diimplementasikan dan direplikasikan sejak tahun 2006 di berbagai desa dan kelurahan di Indonesia yang hasilnya sangat direspon oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penggunanya (*user*).

2. Tujuan Pelaksanaan Model

Tujuan dilaksanakan Model Desa Berketahanan Sosial adalah; 1) Memberdayakan pranata sosial lokal untuk meningkatkan ketahanan sosial suatu komunitas lokal (desa/kelurahan); dan 2) Membangun mobilisasi pranata sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial komunitas lokal yang dilihat dari keempat dimensinya.

3. Sasaran Pelaksanaan Model

Sasaran pelaksanaan Model Desa Berketahanan Sosial terdiri dari 1) Kelembagaan, seperti: a) lembaga sosial lokal yang tumbuh secara tradisional di lingkungan masyarakat; b) lembaga sosial lokal yang tumbuh dan difasilitasi pemerintah, baik yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan (Posyandu), pendidikan, kepemudaan (Karang Taruna), kewanitaan (PKK); c) nilai dan norma yakni aturan-aturan lokal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku sebagai penuntun perilaku sosial pada kehidupan masyarakat lokal; dan d) jaringan pranata sosial lokal yakni hubungan antara kepranataan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat lokal yang disediakan sebagai sumber dukungan dalam kehidupan sosial masyarakat lokal; dan 2) Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), seperti tokoh masyarakat, baik yang bergerak dalam bidang keagamaan, adat, kemasyarakatan, kepemudaan, kewanitaan; pemerintah lokal; dunia usaha; dan perguruan tinggi. Sasaran tersebut diambil maksimal 30 (tiga puluh) orang atau sesuai dengan kebutuhan setempat sebagai peserta yang nantinya diberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan selama 4 (empat) hari kegiatan atau sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Setelah pembimbingan sosial selesai, maka dibentuk Kelompok Kerja Ketahanan Sosial Masyarakat (Pokja Tansosmas) dengan kepengurusannya yang disusun secara demokratis ketiga puluh peserta pembimbingan.

Di dalam kegiatan pembimbingan atau pemberdayaan terdapat salah satu tugas yang sangat penting bagi pokja tansosmas yakni “penyusunan rencana aksi” yang disusun peserta bersama-sama secara partisipatif dengan dibimbing oleh fasilitator pusat dan daerah. Rencana aksi yang telah disusun tersebut nantinya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan berjalan yang dimonitor, dan dilaporkan hasilnya secara tertulis oleh pengurus pokja tansosmas dan 2 (dua) orang pendamping. Pada rencana aksi inilah “proses pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial pada khususnya dan pembangunan bidang lain pada umumnya” dilaksanakan pada lingkup desa atau kelurahan yang mengacu kepada empat dimensi ketahanan sosial masyarakat. Hasil laporan tersebut disampaikan kepada Badiklit Kessos di Jakarta dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta Dinas Sosial Provinsi. Setelah tiga bulan, petugas dari pusat mengadakan monitoring dan memasuki bulan kelima dilakukan evaluasi ke lokasi kegiatan pelaksanaan rencana aksi serta mengadakan *FGD* dengan perangkat kelompok kerja tansosmas yang bersangkutan untuk mengetahui perkembangannya.

4. Prinsip-prinsip Dalam Pelaksanaan Model

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan Model Desa Berketahanan Sosial, terdiri dari prinsip kesadaran komunitas;

kebersamaan; kemandirian/swadaya; kemitraan; kesetaraan; dan keberlanjutan.

5. Langkah-langkah Pelaksanaan Model

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan Model Desa Berketahanan Sosial terdiri dari; 1) Persiapan, yakni rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan petugas seperti fasilitator daerah, pendamping, dan calon peserta, dan lokasi/lapangan; 2) Pelaksanaan Pengembangan, yakni segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemetaan kondisi lokasi dan komunitas lokal; pembekalan atau penguatan kepada fasilitator daerah, pendamping, dan peserta; pengungkapan masalah (*assessment*); perencanaan alternatif program atau kegiatan; formulasi atau penyusunan rencana aksi; dan pembentukan jejaring (kelompok kerja) untuk melaksanakan rencana aksi; 3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim fasilitator pusat dan daerah pada bulan ketiga dan kelima pelaksanaan rencana aksi dengan tujuan untuk memantau dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi kelompok kerja selama pelaksanaan rencana aksinya. Metode yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini adalah *Focused Group Discussion*. Sedangkan Pelaporan, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengurus pokja tansosmas dan pendamping yang dibuat dalam bentuk tertulis. Laporan tersebut disampaikan kepada tim peneliti atau Badiklit Kessos, dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan Dinas Sosial Provinsi; 4) Terminasi, yakni pemutusan hubungan secara formal antara pemberi program dengan komunitas lokal

sebagai sasaran kegiatan, namun demikian secara formal pula pembinaan selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait yang berada di daerah setempat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai tingkat provinsi; dan 5) Refleksi, yang dilakukan oleh kelompok kerja tansosmas untuk mengevaluasi, melaporkan, dan memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka menyusun rencana aksi lebih lanjut.

Pola Pikir dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap Pranata Sosial sebagai perwujudan dari tokoh masyarakat yang terdapat di komunitas lokal (desa/kelurahan) dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.

Pola pikir di atas, menggambarkan pelaksanaan Model Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial yang ditinjau mulai dari Kondisi Awal Pranata Sosial Masyarakat sampai dengan Kondisi Akhir Masyarakat Berketahanan Sosial.

6. Indikator Keberhasilan Yang Terdapat Dalam Model

Indikator keberhasilan pelaksanaan model ini dilihat berdasarkan menguatnya ketahanan sosial masyarakat atau komunitas lokus kegiatan. Indikator yang digunakan model ini tetap mengacu pada dimensi ketahanan sosial masyarakat yang terdapat dalam Kepmensos RI Nomor 12/HUK/2006. Secara terinci indikator keberhasilan yang dimaksud dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

BAGAN POLA PIKIR PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL



Tabel 1: Dimensi, Kriteria, dan Parameter Ketahanan Sosial Masyarakat

No.	Dimensi	Kriteria	Parameter
1.	Tingkat Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian jenis pelayanan sosial dasar; 2. Kemampuan jangkauan pelayanan sosial dasar; 3. Keberlangsungan pelayanan sosial dasar; 4. Perkembangan kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jenis-jenis pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, agama, dan sosial) yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 2. Pelayanan sosial dapat diakses dengan mudah, dekat dengan lingkungan, dan cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 3. Kapasitas kemampuan pelayanan sosial dasar meningkat dan terus menerus tersedia seiring dengan peningkatan kebutuhan dasar. 4. Menurunnya jumlah kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
2.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial lokal.	Keikutsertaan warga dalam organisasi sosial lokal dan berbasis institusi tradisi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan organisasi sosial lokal. 2. Jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan pelayanan sosial. 3. Terpeliharanya relasi sosial.

3.	Tingkat pengendalian terhadap konflik sosial atau tindak kekerasan.	Peran aktif tokoh dan warga masyarakat dalam mencegah, menanggapi, mengatasi konflik sosial atau tindak kekerasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepatnya respon dalam menghadapi situasi konflik sosial atau tindak kekerasan. 2. Dapat mencegah meluasnya masalah konflik sosial atau tindak kekerasan. 3. Dapat mencegah dampaknya.
4.	Tingkat pemeliharaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial.	Kemampuan masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan sumber daya sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan jumlah warga yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. 2. Tersedianya aturan lokal yang terkait dengan pelestarian lingkungan budaya dan nilai sosial. 3. Adanya pranata sosial yang mendukung upaya pemeliharaan lingkungan. 4. Adanya wahana untuk mendukung upaya pemeliharaan sumber daya alam.

7. Metode Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Model

Pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan pranata sosial adalah dengan pendekatan partisipatif. Metode pemahaman masalah dan kebutuhan yang digunakan adalah *Metoda Partisipative Assesment (MPA)*. Sedangkan metode yang digunakan dalam penyusunan rencana aksi adalah *Technic Of Partisipation (TOP)* atau *Partisipatory Rural Apraisal (PRA)*. Selain itu teknik pemberdayaan dan pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah *Focused Group Discussion (FGD)*, ceramah, tanya jawab, dan praktek melalui simulasi. Pada pelaksanaan rencana aksi yang disusun pranata sosial, dilakukan secara berkoordinasi dan bersinergi dengan mitra kerja yang dianggap peduli dan dapat bersama-sama melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang lainnya yang sekaligus membangun desa atau kelurahannya.

IV. RESPONS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MODEL

Implementasi Model Desa Berketahanan Sosial pada dasarnya ikut ambil bagian dalam pembangunan kesejahteraan sosial pada khususnya dan bidang lain pada umumnya. Model ini telah dilaksanakan di puluhan desa atau kelurahan yang berada di berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi dan desa/kelurahan tersebut yang telah dilakukan implementasi model ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Provinsi dan Desa sebagai Lokasi Pelaksanaan Model

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	Lima Puluh Kota	Nagari Pauah Sangik	2006
		Kabupaten Pesisir Selatan	Sembilan Koto	Nagari Siguntur	2006
2.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Gohong	2006
				Anjir	2006
			Kahayan Tengah	Sigi	2007
			Maliku	Purwodadi	2007
			Pandih Batu	Kantan Dalam	2007
Kalawa	Kalawa	2007			
3.	Jambi	Kab. Kerinci	Gunung Raya	Lempur Mudik	2007
4.	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Ulumanda	Ulumanda	2007
				Tandeallo	2007
				Kabiraan	2007
				Sambabo	2007
5.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Air Nipis	Suka Rami	2008
				Ulumanna	Bandar Agung
6.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Bhuana Jaya	2008
				Bukit Pariaman	2008
7.	Sulawesi Utara	Kota Manado	Singkil	Kelurahan Ternate Baru	2008
				Tuminting	Kelurahan Islam
		Kab. Kepulauan Talaud	Miangas	Poi Laten	2008
				Wui Batu	2008
8.	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	Cisolok	Cikahuripan	2008
				Cikidang	Cicareuh
		Kabupaten Garut	Peundeuy	Sukanegara	2009
				Pangrumasan	2009
9.	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Kecamatan Sragi	Mandala Sari	2009
				Way Panji	Sido Makmur
10.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	Sekotong	Kedaro	2009
				Batu Putih	2009

Sumber: Hasil Penelitian, 2006-2009.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Model Desa Berketahanan Sosial di berbagai lokasi tersebut, pada kenyataannya para peserta yang ikut mulai dari generasi muda (17 tahun/Karang

Taruna/IRMA) sampai dengan yang sudah termasuk kategori lanjut usia (60 tahun keatas/ Tokoh Masyarakat) dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ada yang

dimulai dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 21.30 atau sesuai dengan kesepakatan ketika kontrak belajar/kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diselingi dengan waktu istirahat, shalat, dan makan (isoma) sesuai dengan keinginan mereka ketika kontrak belajar yang dibuat bersama. Mereka dapat mengikuti kegiatan yang dipandu oleh fasilitator, baik dari pusat maupun daerah. Bahkan pada saat penyusunan rencana aksi sampai pembuatan komitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang dibuat bersama, mereka saling bahu membahu, saling tolong menolong, dan saling bekerjasama untuk merampungkannya. Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi yang mereka susun bersama setelah, maka setiap peserta diharuskan membuat komitmen dengan memberikan kontribusi nyata berupa barang ataupun dana sebagai modal awal mereka. Selain itu, dari Pemerintah dalam hal ini lingkungan Badiklit Kessos memberikan bantuan dana sosial atau dana stimulan yang ditransfer ke nomor rekening Pokja Tansosmas sebagai pancingan agar mereka bisa menggali lebih besar lagi dari potensi dan sumber yang terdapat di dalam dan di luar lingkungan kerja mereka berada.

Setelah selama kurang lebih 6 (enam) bulan berjalan mereka beraktivitas melaksanakan rencana aksinya, maka manfaatnya dapat dirasakan baik oleh komunitas setempat maupun oleh pihak kecamatan sampai kepada pihak kabupaten/kota atau provinsi sekalipun. Salah satu Pemerintah Daerah (Bupati) merespon dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut, karena menurut Bupati kegiatan Model Desa Berketahanan Sosial yang dilaksanakan di daerahnya “**sangat**

bermanfaat dan berdampak positif” terutama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, baik untuk Pemerintah Kabupaten pada umumnya maupun masyarakat desa setempat pada khususnya. Oleh karena itu, ada bupati yang mengirim “Surat Ucapan Terima Kasih dan sekaligus mengharapkan di tiap tahun, diadakan kegiatan serupa di setiap kecamatannya”.

Surat dimaksud berasal dari Bupati Kerinci Provinsi Jambi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Model Desa Berketahanan Sosial di wilayahnya seperti terlihat di bawah ini.



BUPATI KERINCI

Sungai Penuh, // Maret 2008

Nomor : 460/04/2008/KSPM & KB/2008 Kepada Yth.
Lampiran : - Sdr. Ka. Bandiklat Kesos, Pusat Pengembangan
Perihal : Ucapan terima kasih. Ketahanan Sosial Masyarakat
Departemen Sosial RI
Di -
Jakarta

Memperhatikan kegiatan Pemberdayaan Pranata Sosial yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kerinci tahun 2007 di Desa Lempur Mudik Kecamatan Gunung raya.

Dari Kegiatan yang sudah dilaksanakan kami mengucapkan banyak terima kasih, kegiatan ini sangat bermanfaat dan berdampak positif baik untuk Pemerintah Kabupaten Kerinci umumnya maupun masyarakat desa Lempur Mudik khususnya yaitu dilihat dari segi:

1. Kemampuan masyarakat melindungi warganya yang rentan atau terkena musibah.
2. Partisipasi Masyarakat dalam berorganisasi Sosial.
3. Kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan tindak kekerasan
4. Kemampuan masyarakat memelihara kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.

Tahun 2008 kami mengharapkan kegiatan yang sama masih dilaksanakan di Kabupaten Kerinci dan mohon kiranya untuk 1 (satu) kecamatan dalam Kabupaten Kerinci mendapat satu kegiatan ini. Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci berjumlah 17 (tujuh belas) kecamatan.

Demikian disampaikan untuk dikabulkan diucapkan terima kasih.



Tembusan Di sampaikan Kepada Yth:
1. Sdr. Kepala Dinas KSPM Propinsi Jambi
2. Arsip.

Keberhasilan Model Desa Berketahanan Sosial di daerah sebagai lokus pelaksanaan kegiatan juga dikemukakan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia

(DR.Mardjuki, M.Sc. ketika diwawancarai Wartawan Koran Tempo, Selasa: 12 Juni 2008 di halaman A7) yang menyatakan, bahwa “Hingga kini, cukup banyak program-program Litbang Kessos yang berhasil dilakukan, salah

satunya adalah **Model Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial**. Lebih lanjut dikatakan: “Desa Purwodadi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah desa eks transmigrasi asal Jawa. Dengan penduduk 2.248 jiwa, desa itu mampu menggerakkan masyarakat melalui Pranata-pranata Sosial dan berhasil memetakan berbagai kebutuhannya, bahkan mampu menggalang dana untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk kesejahteraan anggota masyarakatnya”. Sementara itu dengan Wartawan Harian Terbit, Senin: 1 Desember 2008, Kabadiklit Kessos mengatakan, bahwa “Kementerian Sosial saat ini tengah mengembangkan pola konsentrasi pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat. Kebijakan ini diambil untuk membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan industri. Tujuan akhir dari kebijakan ini untuk membentuk Desa Berketahanan Sosial, dimana masyarakat dapat mandiri dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya”. Hal itu terjadi setelah Tim Peneliti atau Fasilitator Pusat dan Daerah bersinergi mengadakan bimbingan sosial dan pemberdayaan terhadap pranata sosial yang terdapat di desa/kelurahan untuk membangun desanya terutama dalam bidang sosial dan bidang lainnya.

Berkaitan dengan adanya respon positif dari Pemerintah Daerah (Bupati maupun Gubernur) merupakan keberhasilan dan prestasi yang patut diapresiasi, namun demikian hal itu juga merupakan suatu penghormatan, tantangan, dan sekaligus peluang untuk mengembangkan sayap ke jangkauan wilayah

yang lebih luas lagi bagi peneliti di lingkungan Badiklit Kessos. Pada tataran ini pula harus disusun dan dibangun komitmen bersama secara profesional antara Badiklit Kessos dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Model Desa Berketahanan Sosial sekaligus Membangun Kesejahteraan Sosial tersebut.

V. PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan di atas, maka pada tataran ini dapat disimpulkan bahwa setiap instansi pemerintah ataupun swasta bahkan organisasi sosial/ lembaga swadaya masyarakat mempunyai konsep atau model dalam pelaksanaan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu model dari berbagai model yang dimiliki Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah ditelurkan, diluncurkan, dan diimplementasikan kalangan peneliti di lingkungan Badiklit Kessos adalah Model Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial. Model ini dalam pelaksanaannya menggunakan sasaran Pranata Sosial sebagai penggerak atau agen pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat komunitas lokal (desa/ kelurahan). Pranata Sosial inilah sebagai perwujudan dari berbagai unsur perwakilan tokoh masyarakat yang berada di komunitas lokal (desa/ kelurahan) dan juga sebagai agen yang berusaha untuk melayani dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial setelah mendapatkan sentuhan perlakuan bimbingan sosial atau pemberdayaan dari Fasilitator Pusat dan Daerah. Dengan penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada 4 (empat) dimensi

ketahanan sosial masyarakat, maka mereka (pranata sosial) berusaha mengadakan pelayanan dan penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan peran serta warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi lokal; berusaha mencegah dan menanggulangi konflik sosial atau tindak kekerasan di komunitas; serta berusaha untuk memelihara, melindungi, menjaga, meningkatkan, bahkan melestarikan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial pada level komunitas lokal. Pada pelaksanaan rencana aksipun, mereka (pranata sosial) selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan mitra kerjanya yang dianggap dapat bersama-sama dalam membangun desa atau kelurahannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang dimunculkan antara lain : 1) Bagi Badiklit Kessos, dengan adanya respon yang baik dari Pemerintah Daerah (Bupati maupun Gubernur) terkait dengan pelaksanaan Model Desa Berketahanan Sosial, maka perlu ditindaklanjuti dalam bentuk “membangun komitmen bersama” antara Badiklit Kessos dengan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk *sharing* dana maupun SDM (*fasilitator*) untuk mewujudkan respon tersebut; dan 2) Demikian halnya dengan Unit-unit Terkait di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Instansi Terkait perlu dibangun kerjasama dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan cara melalui Pola Konsentrasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam melayani dan mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di NKRI ini. Dengan adanya pembangunan secara sinergi tersebut,

merupakan pintu masuk dapat mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan harapan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim; 2008, *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2008*. Jakarta, Pusdatin Kessos.
2008. “BSR, *Setitik Karya Nyata Kepedulian BI*”, dalam Rakyat Merdeka, hal. 20.
2008. “*Depsos Kembangkan Desa Ketahanan Sosial*”, dalam Harian Terbit, hal. 8.
2008. “*Menilik Garda Depan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*”, dalam Koran Tempo, hal. A7.
- Hikmat, Harry, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora Utama.
- Ife, Jim; 1995, *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis, and Practice*. Australia, Longman Pty Ltd.
- Irwanto; 2006, *Focused Group Discussion (FGD) Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Salim, Emil; 2007, “*Dua puluh tiga (23) Pulau di Indonesia Hilang*”, dalam Media Indonesia, hal. 7.

Santoso, Umi Ratih dkk; 2003. *Pedoman Pengumpulan Data Focused Group Discussion (FGD) dan Technology of Participation (TOP)*. Jakarta; Pusbangtansosmas

Suhendi, Ahmad dkk, 2007 *Modul Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta, Pusbangtansosmas

Suhendi, Ahmad; Ani Wuryandari; dan Endah Triyati, 2007 *Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Pranata Sosial*. Jakarta; Pusbangtansosmas

BIODATA PENULIS

Drs. Ahmad Suhendi, M.Si. adalah Peneliti Puslitbang Kessos pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta.